

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 2018

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Cover dalam

<https://ppukab.bps.go.id>

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT (INKESRA)
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018

ISBN/ISBN: -

Nomor Publikasi: 640950.09

Katalog BPS: 4102004.6409

Ukuran Buku: 15 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: xiv + 46

Naskah:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Penajam Paser Utara

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab Umum:

H. Syahrani, SE

Penyunting:

Nurul Istiqomah, S.ST, M.Si

Penulis:

Salsiah, S.ST

Pengolah Data:

Aldi Fauzan Akbar, S.ST

Gambar Kulit:

Much. Yusuf, SE

KATA PENGANTAR

Pembangunan ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan terbentuknya kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan, keberhasilan suatu pembangunan ekonomi ditentukan dengan tinggi atau rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Pembangunan ekonomi tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Publikasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat (Inkesra) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 diharapkan dapat memberikan gambaran atau potret mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai hasil pembangunan di suatu daerah khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara.

Akhir kata, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan, termasuk masyarakat pengguna sebagai bahan rujukan. Terimakasih.

Penajam, Februari 2019

Kepala Badan Pusat Statistik

Kabupaten Penajam Paser Utara



H. SYAHRUNI, SE

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Umum	3
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Ruang Lingkup	4
1.4 Sumber Data dan Sistematika Penulisan	4
BAB II KONSEP DAN DEFINISI	9
2.1 Kependudukan	9
2.2 Kesehatan	9
2.3 Pendidikan	10
2.4 Fertilitas dan Keluarga Berencana	10
2.5 Perumahan dan Lingkungan	10
2.6 TIK	11
BAB III KEPENDUDUKAN	15
BAB IV PENDIDIKAN	21
4.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)	21
4.2 Angka Partisipasi Murni (APM)	22
4.3 Angka Melek Huruf	23

BAB V KESEHATAN	27
5.1 Angka Kesakitan	28
5.2 Jaminan Kesehatan	28
 BAB VI FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA.....	 31
 BAB VII PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN.....	 35
7.1 Fasilitas Rumah Tinggal	35
7.3 Status Kepemilikan Rumah Tinggal.....	36
 BAB VIII TEKNOLOGI INFORMASI.....	 41
 BAB IX KONSUMSI MAKANAN.....	 45

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel ..3.1	Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Timur tahun 2017	16
Tabel 4.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten PPU tahun 2018	22
Tabel 4.2	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2018	23

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar .6.1 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Yang Pernah Melahirkan Dengan Penolong Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Menurut Karakteristik, 2018	31
Gambar 6.2 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Menurut Karakteristik dan Status Penggunaan Alat/Cara KB, 2018	32
Gambar 7.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Memasak/ Mandi/ Cuci dll, 2018	36
Gambar 7.2 Persentase Rumah Menurut Karakteristik dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, 2018.....	37
Gambar 8.1 Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir, 2018	42
Gambar 9.1 Komposisi Konsumsi Makanan Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018	45

PENDAHULUAN

<https://ppukadpps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Umum

Tujuan pembangunan pada hakekatnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat haruslah dibarengi dengan usaha untuk meletakkan landasan yang kuat agar pembangunan di tahap-tahap berikutnya dapat lebih terarah dan berhasil guna. Upaya tersebut tentunya tidak akan dapat memberikan hasil yang maksimal tanpa didukung data yang benar dan baik guna mengevaluasi hasil-hasil pembangunan.

Data benar adalah data yang diperoleh dengan mengikuti metode dan memenuhi konsep-definisi yang telah dirumuskan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Data baik atau data berkualitas baik adalah data yang akurat, tepat waktu dan relevan, tegasnya data tersebut harus mencerminkan hal-hal yang sebenarnya mengenai gejala-gejala (fenomena) yang tengah terjadi.

Indikator Kesejahteraan Rakyat (INKESRA) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 merupakan wahana yang dapat membantu memberikan berbagai data output dan input kesejahteraan rakyat yang ada di masyarakat sebagai hasil dari berbagai proses pembangunan. Muatan dalam INKESRA ini masih bersifat makro, hal ini dikarenakan dimensi cakupan dari kesejahteraan rakyat sangatlah luas.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan publikasi ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesejahteraan rakyat di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara ditinjau dari 7 aspek yakni kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, fertilitas dan keluarga berencana, perumahan dan lingkungan serta pola konsumsi dan pengeluaran rumah tangga.

Tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan gambaran dan bahan masukan serta evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan selanjutnya.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyusunan INKESRA adalah kondisi kesejahteraan rakyat yang ada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Kesejahteraan rakyat mengandung makna yang cukup luas, sedemikian luasnya pengertian kesejahteraan sehingga data statistik ekonomi konvensional seperti pendapatan per kapita belum memadai untuk memberikan gambaran tentang kesejahteraan yang dimaksud. Dalam pengertian yang sangat luas, tidak mungkin untuk menyajikan data statistik yang mampu mengukur tingkat kesejahteraan penduduk secara rinci. Karenanya, indikator yang disajikan dalam publikasi ini hanya mencakup aspek - aspek kesejahteraan yang dapat terukur (*measurable welfare*) saja. Oleh karena itu statistik tentang sosial merupakan komponen utama dalam penyusunan indikator kesejahteraan rakyat.

1.4. Sumber Data dan Sistematika Penulisan

Data yang digunakan dalam publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 ini, adalah hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun penyajian Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 diuraikan dalam sembilan bab yang meliputi :

Bab I Pendahuluan

Merupakan uraian umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, sumber data dan sistematika penyajian.

Bab II Konsep dan Definisi

Merupakan penjelasan dan penjabaran beberapa istilah-istilah yang digunakan dalam publikasi ini.

Bab III	Kependudukan
	Menyajikan indikator kependudukan yang meliputi, jumlah penduduk, rasio jenis kelamin, komposisi penduduk serta angka ketergantungan (<i>dependency ratio</i>).
Bab IV	Pendidikan
	Berisi indikator pendidikan yang meliputi APS, APM, angka harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah.
Bab V	Kesehatan
	Membahas mengenai angka harapan hidup, keluhan kesehatan dan angka kesakitan, pemanfaatan sarana kesehatan, penolong kelahiran, pemberian ASI dan imunisasi balita.
Bab VI	Fertilitas dan Keluarga Berencana
	Merupakan uraian mengenai jumlah penduduk menurut status perkawinan, umur kawin pertama dan penggunaan kontrasepsi (KB).
Bab VII	Perumahan dan Lingkungan
	Mencakup status penguasaan bangunan tempat tinggal, luas dan jenis lantai, jenis atap, jenis dinding, sumber penerangan, fasilitas air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan bahan bakar utama untuk memasak.
Bab VIII	Teknologi Informasi
	Menyajikan tentang akses teknologi informasi masyarakat
Bab IX	Konsumsi Makanan

KONSEP DAN DEFINISI

<https://pptab.bps.go.id>

BAB II

KONSEP DAN DEFINISI

2.1. Kependudukan

- Penduduk adalah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia maupun warga negara asing yang berdomisili di dalam wilayah Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap.
- Rasio Jenis Kelamin (RJK) merupakan perbandingan antara penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan, dan bila nilai RJK penduduk di suatu wilayah di atas 100 maka menunjukkan bahwa proporsi penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan penduduk perempuan.
- Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun.
- Penduduk usia belum produktif adalah penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun.
- Penduduk usia tidak produktif adalah penduduk yang berusia 65 tahun atau lebih.
- Piramida penduduk merupakan dua buah diagram batang yang pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada sisi lainnya, dalam kelompok interval usia lima tahunan.

2.2. Kesehatan

- Angka Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.
- Angka kesakitan adalah gangguan/ keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya.

2.3. Pendidikan

- **Angka Partisipasi Sekolah (APS)** adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.
- **Angka Partisipasi Murni (APM)** adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.
- **Rata – rata lama sekolah** adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)
- **Harapan lama sekolah** adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

2.4. Fertilitas dan Keluarga Berencana

- Wanita usia subur adalah wanita yang berada pada masa mampu melahirkan atau masa reproduksi (15-49 tahun).
- Peserta KB aktif adalah akseptor yang pada saat pencacahan masih aktif mengikuti program KB (memakai alat kontrasepsi).
- Akseptor adalah pasangan usia subur yang menggunakan salah satu alat kontrasepsi.
- Metode kontrasepsi adalah cara/alat yang dipakai untuk mencegah kehamilan.

2.5. Perumahan dan Lingkungan

- Luas lantai rumah yang dikuasai rumah tangga, adalah luas lantai bangunan yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Atap rumah, adalah penutup bagian atas suatu bangunan, sehingga yang mendiami dibawahnya terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya, untuk bangunan bertingkat atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.

- Dinding rumah, adalah batas penyekat dengan rumah tangga dan atau bangunan pihak lain atau sisi luar batas dari bangunan.
- Sumber penerangan rumah tangga, adalah penerangan utama yang digunakan dalam ruangan tempat tinggal sehingga dapat melakukan kegiatan.
- Fasilitas air minum yang dimiliki, adalah fasilitas air minum yang dimiliki (secara sendiri, bersama, umum, membeli dan lainnya) dan digunakan oleh rumah tangga.
- Sumber penggunaan air bersih adalah sumber air terbanyak yang digunakan rumah tangga yang berasal dari ledeng, pompa air, sumur dan mata air terlindung.

2.6. TIK

- Telepon seluler (HP) adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon tetap kabel, namun dapat dibawa ke mana-mana (*portable*, *mobile*) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telekomunikasi kabel
- Komputer mengacu pada komputer desktop, laptop (*portable*) atau tablet (atau komputer genggam yang serupa).
- Internet adalah sebuah jaringan komputer public di seluruh dunia.

KEPENDUDUKAN

<https://ppukadpps.go.id>

BAB III

KEPENDUDUKAN

Jumlah penduduk Kabupaten PPU semakin meningkat dari tahun ke tahun, walaupun jika dibanding dengan kabupaten / kota di Propinsi Kalimantan Timur jumlah penduduk Kabupaten PPU menempati urutan ketiga dari bawah setelah Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Barat. Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten PPU mencapai sekitar 156.731 orang atau sekitar 4,39 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Propinsi Kalimantan Timur. Kabupaten / Kota dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kota Samarinda sebesar 837.573 orang (23,44 persen), Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 750.984 orang (21,01 persen), dan Kota Balikpapan sebesar 629.984 orang (17,63 persen).

Laju pertumbuhan penduduk Propinsi Kalimantan Timur tahun 2017 -2018 mencapai 1,32 persen. Jika dirinci menurut kabupaten/ kota, maka dapat diketahui terdapat empat kabupaten / kota dengan laju pertumbuhan penduduk di atas laju pertumbuhan penduduk propinsi, yaitu Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan laju pertumbuhan Kabupaten PPU tahun 2017 – 2018 hanya berkisar 0,48 persen, merupakan kabupaten dengan pertumbuhan paling rendah dari seluruh kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Timur.

Dilihat dari rasio jenis kelamin penduduk, pada tahun 2018 rasio jenis kelamin penduduk Propinsi Kalimantan Timur sebesar 108. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan atau tepatnya terdapat 108 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan. Kabupaten PPU sendiri menempati merupakan peringkat ketiga kabupaten / kota di Propinsi Kalimantan Timur dengan rasio jenis kelamin terendah, yaitu 108. Sementara itu, rasio jenis kelamin Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan secara berurutan adalah 105, 109, dan 104.

Meningkatnya jumlah penduduk tentunya akan berdampak pada munculnya permasalahan dalam hal kependudukan. Semakin banyak jumlah penduduk, maka dalam penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana atau fasilitas – fasilitas umum agar kesejahteraan penduduk terjamin. Salah satu permasalahan yang dihadapi dengan meningkatnya jumlah penduduk yaitu masalah persebaran penduduk yang tidak merata sehingga berdampak pada kepadatan penduduk yang semakin bertambah. Kepadatan penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018 mencapai 47,02 jiwa / KM².

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten / Kota di Propinsi Kalimantan Timur tahun 2018

Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
Paser	273 408	1.33	111.63
Kutai Barat	149 969	0.91	111.09
Kutai Kartanegara	750 984	1.45	109.53
Kutai Timur	353 199	3.24	116.75
Berau	220 938	1.81	114.91
Penajam Paser Utara	156 731	0.48	108.37
Mahakam Hulu	26 494	0.68	112.96
Balikpapan	629 984	0.72	104.44
Samarinda	837 573	0.95	105.05
Bontang	174 524	1.62	108.79
Kalimantan Timur	3 573 804	1.32	108.72

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Timur, 2018

Diketahui angka rasio ketergantungan Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami penurunan selama tahun 2017-2018. Menurunnya angka rasio ketergantungan juga dapat menggambarkan bahwa jumlah penduduk produktif yang semakin meningkat relatif terhadap jumlah penduduk yang tidak produktif. Jika kecenderungan penurunan angka rasio ketergantungan terus berlangsung, maka diharapkan Kabupaten PPU akan segera

sampai pada fase rasio beban ketergantungan mencapai titik terendah (*windows of opportunity*). Angka rasio ketergantungan Kab. Penajam Paser Utara pada tahun 2018 adalah 45,00 yang artinya tiap 100 orang penduduk produktif menanggung sebanyak 45 orang penduduk belum produktif dan tidak produktif.

Angka rasio ketergantungan juga dapat menunjukkan tanda-tanda adanya bonus demografi yaitu angka ketergantungan di bawah 50 yang berarti bahwa satu orang penduduk tidak produktif ditanggung oleh 1-2 orang penduduk produktif. Seperti diketahui bahwa bonus demografi terjadi apabila mayoritas penduduk Indonesia adalah usia angkatan kerja 15-64 tahun, dimana penduduk pada kelompok ini menjadi potensial apabila sumber daya manusianya berkualitas. Sebaliknya, akan menjadi bumerang jika kualitas sumber daya manusia penduduk produktif itu rendah.

PENDIDIKAN

<https://prokab.bps.go.id>

BAB IV

PENDIDIKAN

Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Pemerataan, akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia khususnya penduduk Kabupaten PPU memiliki kecakapan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.

Beberapa indikator yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan SDM antara lain, Tingkat Pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM), juga beberapa indikator pendidikan lainnya.

4.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Salah satu tujuan dari Millenium Development Goals (MDGs) adalah menjamin bahwa sampai dengan tahun 2015 semua anak, baik laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar (primary schooling). Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk menilai pencapaian MDGs yaitu melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan, namun bukan berarti meningkatnya APS juga meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Pada tahun 2018, penduduk usia 7-12 tahun seluruhnya telah mengenyam pendidikan atau bersekolah. Sedangkan pada kelompok usia 13-15 tahun masih cukup besar bila dibandingkan dengan kelompok umur 7-12 tahun yaitu sebesar 2,72 persen penduduk yang belum mengenyam pendidikan, angka ini masih lebih sedikit dibandingkan persentase penduduk usia 16-18 tahun dimana masih 14,28 persen penduduk yang belum mengenyam pendidikan. Tabel di bawah juga menunjukkan bahwa APS penduduk laki-laki maupun perempuan pada kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun tidak menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok.

4.2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM Kabupaten PPU tahun 2018 pada jenjang SD, SLTP, dan SLTA masing –masing adalah 100,00, 80,10, dan 69,17. Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, APM perempuan lebih besar dibanding APM laki-laki pada jenjang SLTP dan SLTA.

Tabel 4.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten PPU tahun 2018

Indikator	Laki-Laki	Perempuan	Total
Angka Partisipasi Sekolah (APS)			
7-12 tahun	100.00	100.00	100.00
13-15 tahun	94.94	100.00	97.28
16-18 tahun	83.28	88.80	85.72
Angka Partisipasi Murni (APM)			
SD	100.00	100.00	100.00
SLTP	77.02	83.70	80.10
SLTA	61.18	79.28	69.17

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Timur, 2018

4.3. Angka Melek Huruf

Penduduk Kabupaten PPU belum secara keseluruhan memiliki kemampuan membaca dan kemampuan menulis. Pada tahun 2018, masih terdapat 0,85 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas yang belum dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin dan huruf lainnya.

Tabel 4.2. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2018

Persentase Kemampuan Membaca dan Menulis	Laki-Laki	Perempuan	Total
Huruf Latin	97.28	94.96	96.18
Huruf Lainnya	14.13	16.02	15.03
Melek Huruf	99.57	98.68	99.15

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2018

KESEHATAN

<https://ppd.kab.bps.go.id>

BAB V

KESEHATAN

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik. Pada akhirnya hasil dari kegiatan perekonomian adalah tingkat produktivitas penduduk suatu wilayah dapat diwujudkan. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik, seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang, serta meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Upaya pemerintah melalui program – program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kesakitan serta status gizi balita.

5.1. Angka Kesakitan

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, maka Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/ keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/ napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Hasil Susenas tahun 2018 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Kabupaten PPU mencapai 16,40 persen. Lamanya sakit merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi keluhan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk suatu wilayah. Semakin besar angka kesakitan menunjukkan berarti semakin rendah derajat kesehatan penduduk yang bersangkutan.

5.2 Jaminan Kesehatan

Untuk mewujudkan komitmen global sebagaimana amanat resolusi WHA ke -58 yang menginginkan setiap negara mengembangkan *Universal Health Coverage (UHC)* bagi seluruh penduduk, maka pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain pemerintah, pihak lain seperti asuransi swasta dan perusahaan juga turut berkontribusi dalam penyediaan jaminan kesehatan. Penduduk Kab. Penajam Paser Utara yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan pada tahun 2018 adalah sebesar 61,92 persen, atau masih terdapat 38,08 penduduk yang belum menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan.

FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA

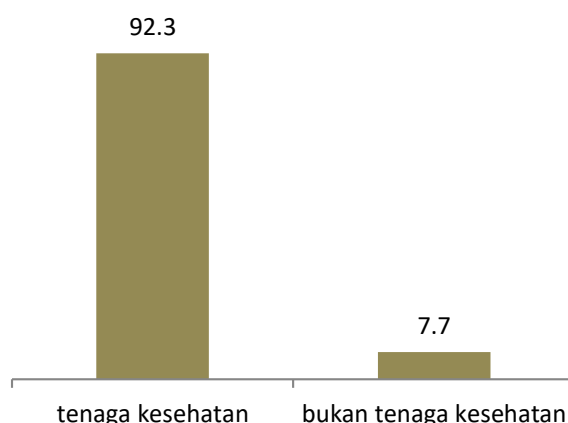
<https://idbukapbps.go.id>

BAB VI

FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya. Seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa, seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 telah ditetapkan dalam Perpres No. 5 tahun 2010 yaitu meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu. Usaha pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan ternyata memperlihatkan hasil yang baik, dimana persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dengan tenaga kesehatan sebagai persalinannya mencapai 92,30 persen.

Gambar 6.1. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15 – 49 Tahun Yang Pernah Melahirkan Dengan Penolong Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Menurut Karakteristik, 2018



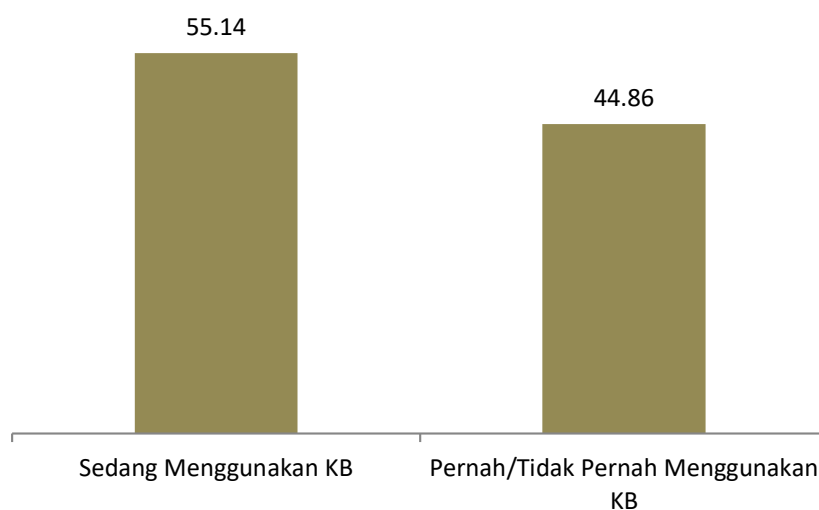
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara Utara, 2018

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, fasilitas kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil susenas 2018, Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan di Fasilitas Kesehatan adalah 89,91 persen.

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2018, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB mencapai 55,14 persen.

Gambar 6.2. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15 – 49 Tahun Menurut Karakteristik dan Status Penggunaan Alat/Cara KB, 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2018

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

<https://puskab.bps.go.id>

BAB VII

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang, yang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Selain itu rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberian ketentraman hidup bagi manusia dan menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi status kesehatan penghuninya.

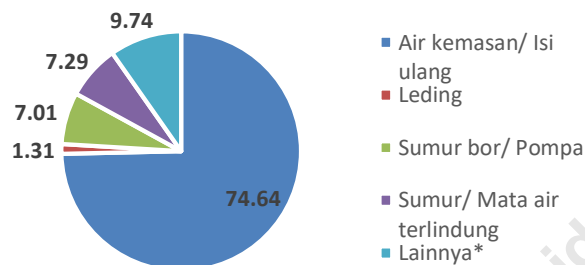
Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

7.1. Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas rumah tinggal, seperti tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Besarnya persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih (air kemasan bermerk, air isi ulang, leding, sumur bor, sumur terlindung,

dan mata air terlindung) pada tahun 2018 telah mencapai 84,82 persen. Sedangkan sisanya menggunakan sumur tak terlindung, air permukaan dan air hujan. Selain untuk minum, penggunaan air bersih juga diperlukan untuk kebutuhan memasak, mandi, cuci, dll.

Gambar 7.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Memasak/ Mandi/ Cuci dll, 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penaja Penajam Paser Utara Utara, 2018

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Pada tahun 2018, rumah tangga yang menggunakan jamban dengan tengki septik sudah mencapai 73,87 persen.

Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibanding sumber penerangan lainnya. Persentase rumah tangga yang telah menikmati fasilitas penerangan listrik dari PLN tahun 2018 adalah sebanyak 83,75 persen.

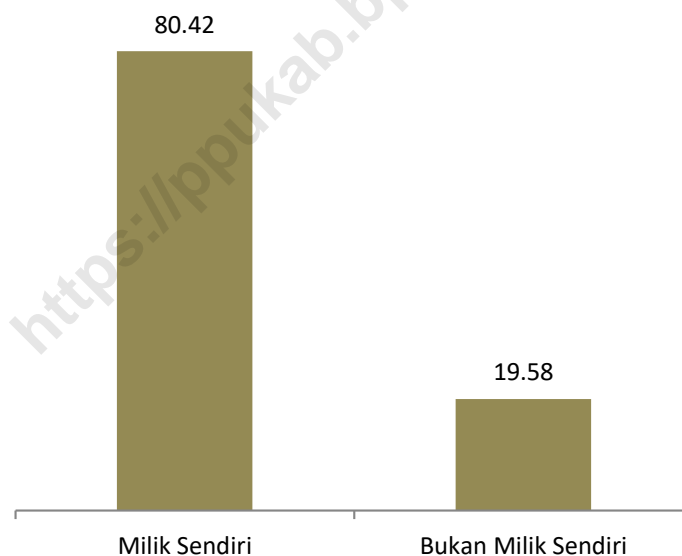
7.2. Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Status kepemilikan rumah tinggal merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa,

bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status rumah kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil Susenas 2018, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 80,42 persen, sisanya 19,58 persen adalah bukan milik sendiri.

Gambar 7.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara Utara, 2018

TEKNOLOGI INFORMASI

<https://mpukab.bps.go.id>

BAB VIII

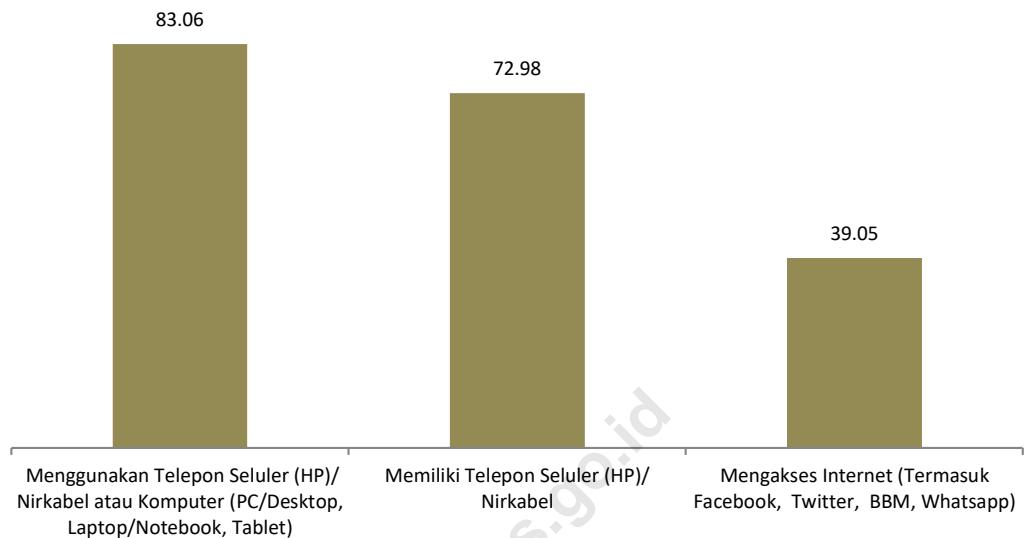
TEKNOLOGI INFORMASI

Di era informasi saat ini, kemajuan suatu bangsa sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur dan akses Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) untuk mendorong pergerakan sektor ekonomi. Tantangan pembangunan dari suatu negara besar seperti Indonesia adalah penyediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi. Infrastruktur membantu konektivitas antar wilayah satu dengan wilayah lain secara cepat dan luas. Di samping pembangunan secara fisik, pembangunan jalur transportasi dan TIK juga penting sebagai salah satu infrastruktur konektivitas.

Kemajuan di bidang teknologi informasi memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Potensi TIK jika dikembangkan secara optimal dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam pembangunan nasional, TIK berperan serta menciptakan lapangan pekerjaan, memberdayakan masyarakat, dan mengembangkan kemampuan masyarakat. Semakin banyak penduduk yang memiliki akses TIK dan terus mengikuti kemajuan teknologi, maka dapat dipastikan kesejahteraan penduduk akan semakin meningkat.

Persentase penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara yang mempunyai telepon selular, komputer, dan akses internet sudah cukup tinggi. Pada tahun 2018, persentase penduduk 5 tahun ke atas yang menggunakan telepon seluler atau komputer mencapai 83,06 persen.

Gambar 8.1. Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir, 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara Utara, 2018

KONSUMSI MAKANAN

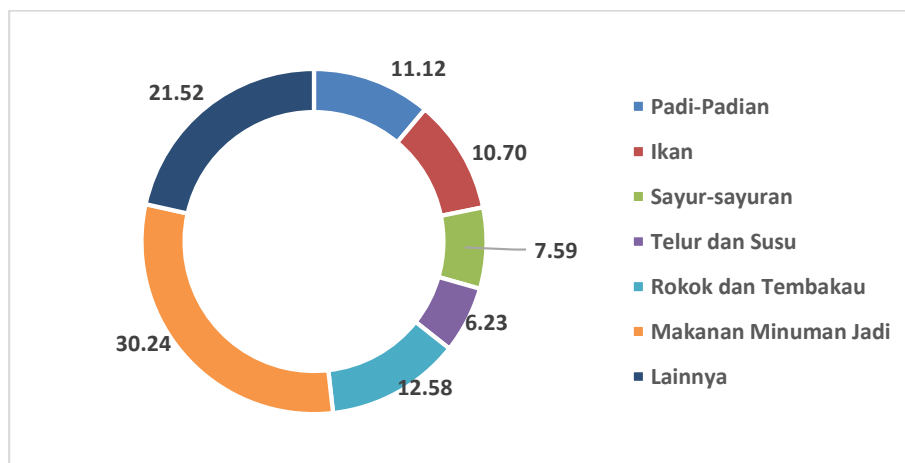
KONSUMSI MAKANAN

Tingkat kesejahteraan rumah tangga secara nyata dapat diukur dari tingkat pendapatan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum hidup layak. Semakin besar pengeluaran rumah tangga terutama porsi pengeluaran untuk bukan makanan, maka tingkat kesejahteraan rumah tangga yang bersangkutan akan semakin baik. Pada tahun 2018 Persentase konsumsi Kabupaten PPU untuk kebutuhan makanan sebesar 48,17 persen sedangkan untuk kebutuhan bukan makanan hanya 51,83 persen dari total rata-rata pengeluaran perkapita Rp 1.243.424,- perbulan.

Pengeluaran kebutuhan makanan didominasi untuk pengeluaran makanan dan minuman jadi sebesar 30,24 persen, rokok 12,58 persen, padi-padian sebesar 11,12 persen, ikan sebesar 10,70 dan untuk sayuran sebesar 7,59 persen. Jika dibanding tahun sebelumnya, terjadi kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 11,51 persen.

Pengeluaran makanan berupa rokok mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016, yaitu sebesar 13,13 persen menjadi 12,58 persen. Dan konsumsi rokok ini lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan pokok makanan lainnya seperti padi-padian, ikan dan sayuran.

Gambar 9.1. Komposisi Konsumsi Makanan Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2018

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Jalan Negara KM. 09 Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, 76142
Telp. 0542-7211478; Email: bps6409@bps.go.id
Website: <http://ppukab.bps.go.id>